



2021

RENCANA KERJA (RENJA)



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DINAS KESEHATAN

JL. RA WIRYAATMAJA NO. 4 PURWOKERTO

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GRAFIK	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sistematika	3
BAB II HASIL EVALUASI KINERJA RENJA TAHUN 2018	4
A. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran	4
B. Pengukuran Evaluasi dan Analisis Kinerja sasaran Strategis	5
C. Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci	13
D. Realisasi Anggaran dan Pencapaian Kinerja	17
E. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	19
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020	28
A. Tujuan	28
B. Sasaran	28
C. Rencana Program dan kegiatan	28
BAB IV PENUTUP	38

**RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusun Rencana Kerja. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja). Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2021 berpedoman pada Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2018 - 2023, hasil evaluasi hasil Renja Dinas Kesehatan tahun lalu bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju dan hasil evaluasi hasil Renja Dinas Kesehatan tahun lalu bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Kesehatan.

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2021 adalah :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2020;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembanguann Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
- l. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
- m. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2023

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

b. Tujuan

- 1) Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2021;
- 2) Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2021;
- 3) Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi.

1.4 Sistematika

Rencana Kerja Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun 2019

Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab IV. Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode tahun 2018 - 2023. Pelaksanaan Rencana Strategis periode 2018 - 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas secara tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang memuat tentang tujuan, sasaran dan program kegiatan.

A. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Kesehatan Tahun 2019 melaksanakan 15 Program dan 92 Kegiatan. Pengukuran kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas berdasarkan kinerja sasaran dengan capaian 98,72%. Adapun realisasi indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Tahun 2019 kami sajikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya kualitas kesehatan ibu	Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)	67,80	37,62	144,51
2.	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,53	73,45	99,89
3.	Meningkatnya kualitas kesehatan balita	Persentase Balita Gizi Buruk (%)	0,07	0,07	100
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					114,8

Sumber: Data Terolah Capaian Kinerja Tahun 2019

Berdasarkan tabel 2.1 diketahui bahwa realisasi kinerja Angka Kematian Ibu (AKI) di tahun 2019 sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 37,62 per 100.000 kelahiran hidup dengan capaian kinerja 144,51 % dan termasuk dalam kategori sangat baik. Sedangkan Angka Usia Harapan Hidup di tahun 2019 adalah 73,45 tahun, angka tersebut menunjukkan bahwa Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Banyumas belum mencapai target Angka Usia Harapan Hidup yang ditetapkan dengan capaian kinerja 99,89 %. Walaupun capaian kinerja, Angka Usia Harapan Hidup belum sesuai target yang telah ditetapkan, tetapi capaian kinerja masuk dalam kategori sangat baik. Selanjutnya untuk capaian kinerja persentase balita gizi buruk sebesar 100 %, yang menandakan bahwa persentase

balita gizi buruk di Kabupaten Banyumas sudah sesuai harapan yaitu 0,07 % karena realisasi kinerja tidak melebihi target yaitu sebesar 0,07 %. Capaian kinerja persentase balita gizi buruk juga termasuk dalam kategori sangat Baik.

Menurut perhitungan rata-rata capaian kinerja sasaran strategis diperoleh hasil sebesar 114,8% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Dua indikator kinerja sasaran dengan capaian kinerja mencapai angka 100% dan satu diantaranya lebih dari 100% yaitu Angka Kematian Ibu (AKI) yang menandakan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas selama tahun 2019 telah sangat berhasil dalam menurunkan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Banyumas. Sama halnya untuk capaian kinerja persentase balita gizi buruk sebesar 100%, hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas pada tahun 2019 telah berhasil dalam penanganan kasus balita gizi buruk yang terdapat di Kabupaten Banyumas. Dari ketiga indikator kinerja sasaran strategis terdapat satu indikator dengan capaian kurang dari 100%, yaitu Angka Usia Harapan Hidup. Hal tersebut dikarenakan hasil penghitungan Angka Usia Harapan Hidup berasal dari Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyumas dan untuk hasil di tahun 2019 belum terpublikasi sehingga masih menggunakan realisasi di tahun sebelumnya.

B. PENGUKURAN EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS

Tabel 2.2
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2015		2016		2017		2018		2019	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya kualitas kesehatan ibu	Angka Kematian Ibu (per 100.000)	90	101,15	80	78,19	70	54,16	65	67,87	67,80	37,62
2.	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	70,00	73,12	70,06	73,23	70,12	73,33	70,17	73,45	73,53	73,45
3.	Meningkatnya kualitas kesehatan balita	Persentase Balita Gizi Buruk (%)	0,13	0,05	0,12	0,05	0,11	0,05	0,10	0,07	0,07	0,07

Sumber: Data Terolah Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2019

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 terkait pembangunan di bidang kesehatan tertuang di Misi 2 yaitu meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan. Tujuan pembangunan bidang kesehatan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yaitu meningkatkan

kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator tujuan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Melalui tujuan tersebut dirumuskan sasaran pembangunan bidang kesehatan adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Indikator kedua yang bersifat negatif adalah persentase balita gizi buruk. Realisasi persentase balita gizi buruk pada tahun 2015 sampai dengan 2017 berada di angka stagnan yaitu 0,05% kemudian naik menjadi 0,07% di tahun 2018 dan tahun 2019. Walaupun mengalami kenaikan dari tahun 2017, realisasi kinerja pada tahun 2018 masih berada di bawah target yang ditetapkan yaitu 0,10%. Kemudian pada tahun 2019 realisasi kinerja persentase balita gizi buruk berada pada angka yang sama dengan target yang ditetapkan halnya dengan target Angka Usia Harapan Hidup yang selalu meningkat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 karena indikator tersebut bersifat positif dimana semakin tinggi realisasi kinerja maka semakin baik capaian kinerjanya. Realisasi Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Banyumas dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan yaitu dari 73,12 tahun di tahun 2015 menjadi 73,45 tahun di tahun 2019 dan selama lima tahun terakhir terjadi kenaikan Angka Usia Harapan Hidup sebesar 0,45%.

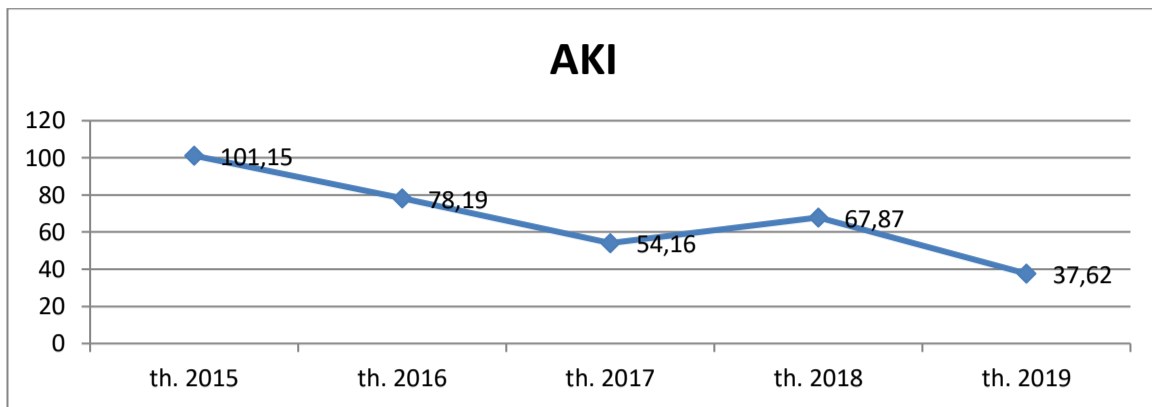
Berikut analisis capaian kinerja atas indikator sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas secara terperinci:

1. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup

Angka Kematian Ibu (AKI) di tahun 2015 merupakan angka tertinggi selama lima tahun terakhir yaitu 101,15 per 100.000 kelahiran hidup. Kemudian dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, Angka Kematian Ibu (AKI) terus menurun hingga mencapai 54,16 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2017. Angka Kematian Ibu (AKI) di tahun 2018 naik mencapai 67,87 per 100.000 kelahiran hidup. Di tahun 2019 terjadi penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 44,57% dari tahun sebelumnya. Trend Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Banyumas dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat dalam grafik 2.1

Grafik 2.1

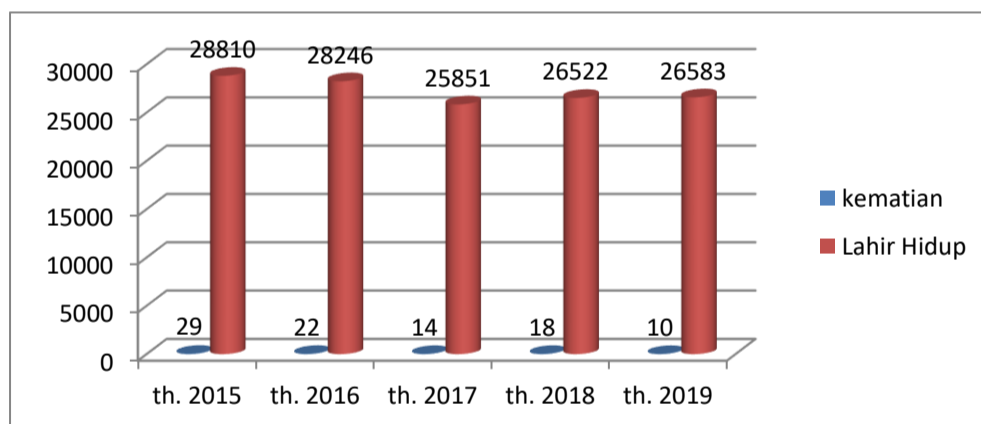
Trend Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2019



Sumber: Data Program Kesehatan Ibu dan Anak Tahun 2019

Angka Kematian Ibu di tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018. Terjadi penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dari 67,87 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2018 menjadi 37,62 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2019. Berikut adalah perbandingan jumlah kasus kematian ibu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang dapat dilihat dalam grafik 2.2

Grafik 2.2
Trend Kasus Kematian Ibu
Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2019



Sumber: Data Program Kesehatan Ibu dan Anak Tahun 2019

Berdasarkan grafik 2.2 diketahui bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 jumlah kematian ibu terus menurun, dari 29 kasus di tahun 2015 turun menjadi 14 kasus di tahun 2017 kemudian naik kembali menjadi 18 kasus di tahun 2018 dan kembali turun di tahun 2019 dengan jumlah 10 kasus. Dalam grafik 2.2 juga menunjukkan jumlah kelahiran hidup dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 terus mengalami penurunan sebesar 10,27% dan mulai meningkat di tahun 2018 dan tahun 2019.

Kasus kematian ibu di Kabupaten Banyumas tahun 2019 berdasarkan kelompoknya terjadi pada:

- kelompok ibu hamil sebanyak 1 kasus (10%)
- kelompok ibu bersalin sebanyak 6 kasus (60%)

- kelompok ibu nifas sebanyak 3 kasus (30%)

Menurut data Audit Maternal Perinatal (AMP) yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas diketahui bahwa penyebab kematian ibu pada tahun 2019 diantaranya sebagai berikut:

- Pre Eklamsia Berat (PEB/keracunan kehamilan) sebanyak 5 kasus (50%)
- perdarahan pasca persalinan sebanyak 1 kasus (10%)
- peritonitis sebanyak 1 kasus (10%)
- penyakit jantung sebanyak 1 kasus (10%)
- sepsis/infeksi sebanyak 1 kasus (10%)
- hepatitis sebanyak 1 kasus (10%)

Selama lima tahun terakhir capaian kinerja Angka Kematian Ibu (AKI) yang tidak mencapai target atau dengan capaian kinerja kurang dari 100% adalah pada tahun 2015 dan tahun 2018. Berikut adalah tabel yang menunjukkan capaian kinerja Angka Kematian Ibu dari tahun 2015-2019.

Tabel 2.3
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2019

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2015	90	101,15	87,61
2016	80	78,19	102,26
2017	70	54,16	122,63
2018	65	67,87	95,58
2019	67,80	37,62	144,51

Sumber: Data Terolah Program Kesehatan Ibu dan Anak Tahun 2019

Permasalahan yang dihadapi di tahun 2019 terkait Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

- Kurang optimalnya pemanfaatan buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
- Sistem P4K belum dijalankan dengan optimal;
- Adanya penyakit penyerta pada ibu;
- Keterlambatan penanganan di RS Rujukan PONEK.

Upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan diantaranya:

- Optimalisasi pelaksanaan Kelas Ibu Hamil untuk memantau ibu hamil, bersalin dan nifas secara ketat;
- Optimalisasi buku KIA dengan “Maca Buku KIA Sedina Selembar;
- Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan RS PONEK terkait hasil rekomendasi Audit Maternal Perinatal (AMP);
- Pendampingan deteksi dini ibu hamil risiko tinggi oleh POGI;
- Sarasehan LPLS dengan Bupati Banyumas.

Seluruh upaya pemecahan permasalahan tersebut tidak lepas atas dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas yaitu dengan adanya Instruksi Bupati Banyumas Nomor 440/3072 Tahun 2017 tentang Upaya Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Bayi Kabupaten Banyumas serta Keputusan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2017 tentang

Pembentukan Pokja Penyelamatan Ibu dan Bayi.

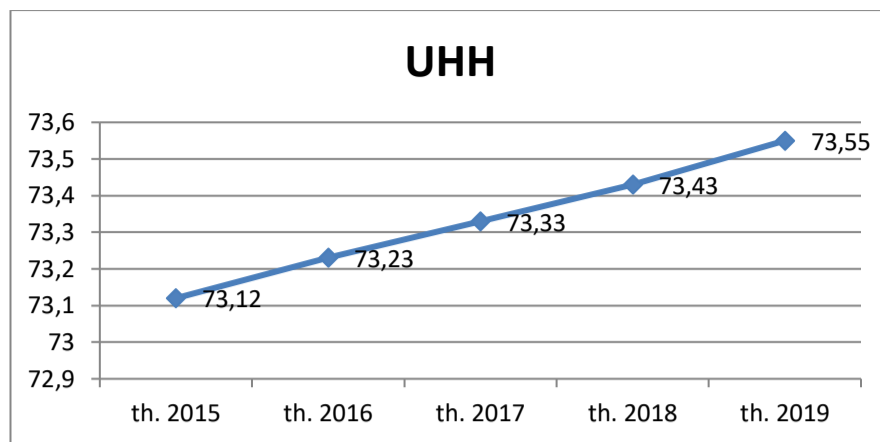
2. Angka Usia Harapan Hidup

Definisi Angka Usia Harapan Hidup menurut Badan Pusat Statistik adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x pada suatu tahun tertentu dan dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka Usia Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Angka Usia Harapan Hidup adalah salah satu indikator untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat. Semakin tinggi Angka Usia Harapan Hidup maka derajat kesehatan masyarakat semakin baik, begitu pula sebaliknya. Angka Usia Harapan Hidup merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai derajat kesehatan penduduk yang menggambarkan kualitas hidup. Sebagai indikator kualitas kesehatan dan kesejahteraan, Angka Usia Harapan Hidup dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya kualitas lingkungan, kualitas pelayanan kesehatan, pola hidup dan gaya hidup individu. Dengan mengetahui indikator Angka Usia Harapan Hidup maka Pemerintah Daerah dapat merumuskan upaya dalam meningkatkan faktor-faktor yang bisa meningkatkan Angka Usia Harapan Hidup yang kemudian berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Banyumas Tahun 2019 mencapai 73,45 tahun dengan capaian kinerja sebesar 99,89 %. Berdasarkan hasil capaian kinerja tersebut diketahui bahwa Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Banyumas belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam yaitu 73,55 tahun. Trend Angka Harapan Hidup di Kabupaten Banyumas sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada grafik 2.3.

Grafik 2.3
Trend Angka Usia Harapan Hidup
di Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2019

Berdasarkan grafik 2.3 diketahui bahwa Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Banyumas dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terus meningkat. Hal tersebut menggambarkan adanya perbaikan derajat kesehatan masyarakat selama lima tahun terakhir. Upaya yang sudah dilakukan dalam rangka mendukung peningkatan Angka Usia Harapan

Hidup di Kabupaten Banyumas adalah penggalakan deteksi dini Penyakit Tidak Menular (PTM) melalui Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu). Hingga Tahun 2019 sudah terbentuk 482 Posbindu di desa, sekolah maupun perkantoran.

Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di Posbindu diantaranya adalah pemeriksaan tekanan darah, gula darah sewaktu, kolesterol dan asam urat yang bertujuan untuk skrining Penyakit Tidak Menular.

Upaya lain yang telah dilakukan adalah pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) melalui gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS). Dalam kehidupan sehari-hari, praktik hidup sehat merupakan salah satu wujud Revolusi Mental. GERMAS mengajak masyarakat untuk membudayakan hidup sehat, agar mampu mengubah kebiasaan-kebiasaan atau perilaku tidak sehat. Secara khusus, GERMAS meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat serta meningkatkan produktivitas. Peningkatan angka harapan hidup tidak hanya soal umur panjang, tetapi juga soal hidup sehat dan produktivitas.

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas juga sangat berkomitmen terkait peningkatan Angka Usia Harapan Hidup, hal tersebut ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang menyebutkan bahwa asap rokok mengandung zat adiktif yang dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu maupun masyarakat, baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif, sehingga perlu diatur mengenai ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok.

Tabel 2.4

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Angka Usia Harapan Hidup
Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2019

Tahun	Target (tahun)	Realisasi (tahun)	Capaian Kinerja (%)
2015	70,00	73,12	104,46
2016	70,06	73,23	104,52
2017	70,12	73,33	104,58
2018	70,17	73,43	104,67
2019	73,53	73,45	99,89

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2019

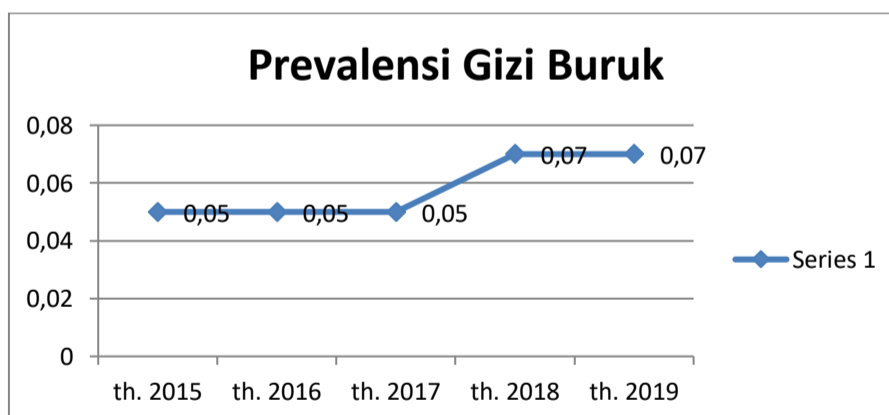
Berdasarkan tabel 2.4 diketahui bahwa capaian Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Banyumas dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan dan selama empat tahun diperoleh hasil selalu lebih dari 100 %. Capaian kinerja di tahun 2019 tidak mencapai target dikarenakan masih mempergunakan Angka Usia Harapan Hidup tahun lalu. Hal tersebut menandakan bahwa derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bayumas termasuk dalam kategori sangat baik.

3. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Banyumas sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 berada pada angka 0,05%. Kemudian di tahun 2018 dan tahun 2019 persentase balita gizi buruk meningkat menjadi 0,07%. Trend persentase balita gizi buruk di Kabupaten Banyumas selama kurun waktu tersebut dapat dilihat pada

Grafik 2.4

Trend Persentase Balita Gizi Buruk
Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2019



Sumber: Data Terolah Program Gizi Tahun 2019

Berdasarkan grafik 2.4 diketahui bahwa pada tahun 2019, persentase balita gizi buruk berada pada angka yang sama dengan tahun sebelumnya, yaitu 0,07%. Selama kurun waktu lima tahun terakhir persentase balita gizi buruk di Kabupaten Banyumas sudah mencapai target yang telah ditetapkan dengan rata-rata capaian setiap tahunnya

adalah 100 %. Capaian kinerja persentase balita gizi buruk dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel 2.5.

Tabel 2.5
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Balita Gizi Buruk
Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2019

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
2015	0,13	0,05	161,54
2016	0,12	0,05	158,33
2017	0,11	0,05	154,55
2018	0,10	0,07	130
2019	0,07	0,07	100

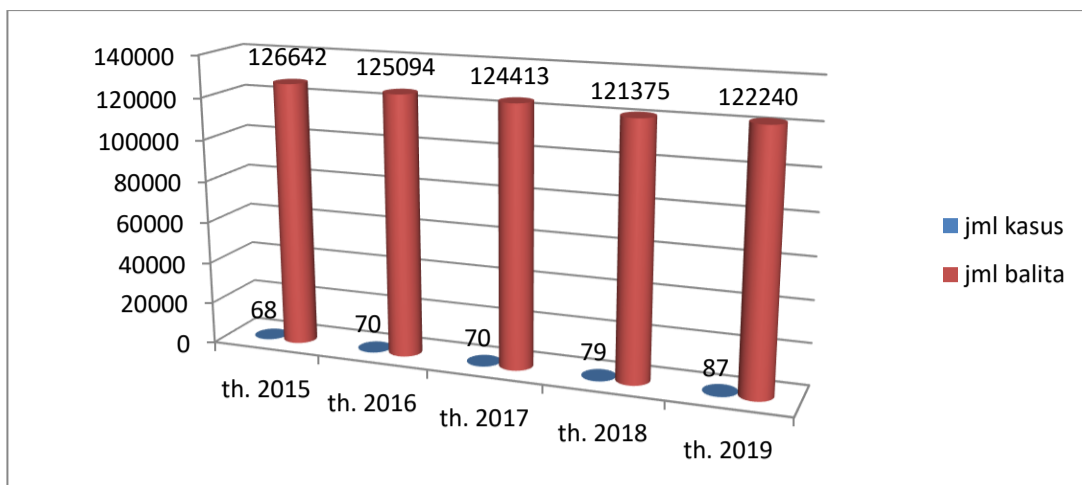
Sumber: Data Terolah Program Gizi Tahun 2019

Capaian kinerja untuk persentase balita gizi buruk di tahun 2019 adalah 100%. Selama lima tahun terakhir walaupun capaian kinerja persentase balita gizi buruk termasuk dalam kategori sangat baik, tetapi capaiannya terus menurun. Hal tersebut dikarenakan terjadi kenaikan persentase balita gizi buruk sebesar 40% dari tahun 2017. Selama dua tahun terakhir persentase balita gizi buruk berada pada angka yang sama.

Kasus gizi buruk di Kabupaten Banyumas pada tahun 2019 sebanyak 87 kasus dengan rincian 39 kasus diderita oleh balita perempuan dan 48 kasus diderita oleh balita laki-laki. Trend jumlah kasus gizi buruk selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 2.5.

Grafik 2.5

Trend Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk
Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2019



Sumber: Data Terolah Program Gizi Tahun 2019

Jumlah kasus balita gizi buruk yang ditemukan dan ditangani pada tahun 2019 sebanyak 87 kasus meningkat dari tahun 2018 dengan jumlah 79 kasus. Penyebab kasus balita gizi buruk pada tahun 2019 dikarenakan tiga hal berikut:

- pola asuh sebanyak 61 kasus (70,11%);
- kelainan kongenital sebanyak 21 kasus (24,13%);
- infeksi sebanyak 5 kasus (5,74%);

Kasus terbanyak disebabkan oleh pola asuh, yaitu asupan tidak sesuai dengan menu sehat dan seimbang yang paling banyak disebabkan faktor ekonomi. Penyebab kedua adalah kelainan kongenital seperti kelainan jantung, kelainan tumbang, *hidrosephalus*, *down syndrome* dan *cerebral palsy*. Penyebab ketiga adalah infeksi paru, meningitis dan TORCH. Selain hal tersebut, masalah utama kasus balita gizi buruk adalah ibu dengan anemia dan Kurang Energi Kronis (KEK).

Upaya pemecahan masalah yang dilakukan terkait balita gizi buruk diantaranya:

- Pelaksanaan Kelas Ibu dan Bayi (konseling gizi);
- Sosialisasi menu sehat dan seimbang (Puskesmas melalui posyandu, Dinas Kesehatan melalui guru dan bunda PAUD);
- Pemberian PMT 90 hari bagi balita gizi buruk;
- Rujukan ke Rumah Sakit untuk mengetahui sumber masalah penyebab gizi buruk.

C. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Secara keseluruhan capaian indikator kinerja Utama dan Indikator kinerja Kunci (IKK) pada Tahun 2019 rata-rata adalah tercapai/baik, seperti yang tertera pada tabel 2.6.

Tabel 2.6

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kesehatan kabupaten Banyumas tahun 2019

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Kinerja Tahun 2019	
				Target 2019	Capaian 2019
1	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73.43	73.53	73.55
2	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	Per 100rb	67.87	67.80	37.62
3	Angka Kematian Bayi	Permil	7.84	8.03	7.41
4	Angka keberhasilan pengobatan pasien TB RO	%	70	75	53.8
5	Angka Kejadian Malaria (API : kasus per 1000 penduduk)	/1000	< 0.05	< 0.05	0.036
6	Angka Kelangsungan Hidup bayi	Anka	992.16	991.97	992
7	Angka kematian balita	Permil	8.94	8.90	9.18
8	Angka Kematian Neonatal	Permil	5.81	5.50	4.14
9	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100	100	100
10	Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani	%	100	100	145.52
11	Cakupan desa/ kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan epidemiologi	%	100	100	100
12	Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100
13	Cakupan Desa Siaga Aktif Mandiri	%	10.0	11.0	11.48
14	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	%	100	100	86.91
15	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	100	100
16	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	%	100	100	100
17	Cakupan kunjungan bayi	%	100	100	100
18	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	100	100	100
19	Cakupan pelayanan anak balita	%	100	100	100
20	Cakupan pelayanan balita sesuai standar	%	100	100	100
21	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100	100	100
22	Cakupan pelayanan ibu hamil K1	%	100	100	100
23	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	100	100	100
24	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pada pondok pesantren	%	NA	100	100
25	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	100	100
26	Cakupan pelayanan nifas	%	100	100	100
27	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	%	100	100	100
28	Cakupan penduduk miskin non kuota yang mempunyai JPK	%	NA	100	114.9
29	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	1100
30	Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA	%	100	100	100
31	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	%	NA	100	100
32	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100	100	100
33	Cakupan Puskesmas	%	144	148	148
34	Cakupan Puskesmas Pembantu	%	11.78	11.78	11.78
No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Kinerja Tahun 2019	
				Target 2019	Capaian 2019
35	Case Fatality Rate DBD (%)	%	3.63	< 1	0.06

36	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kesehatan RSUD Ajibarang		79.00	82.00	82
37	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kesehatan RSUD Banyumas		74.89	75.00	80
38	Indeks kepuasan Masyarakat pelayanan kesehatan	Indeks	NA	77.0	81.72
39	Non AFP rate per 100.000 penduduk		>= 2	>= 2	11.38
40	Penderita diare yang ditangani	%	100	100	100
41	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	NA	100	45.61
42	Persentase balita gizi kurang mendapatkan PMT	%	100	100	100
43	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100
44	Persentase bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	%	NA	5	5.94
45	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	100	100	100
46	Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif	%	NA	54.00	66.05
47	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan	%	72.73	77.27	79
48	Persentase Desa melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	%	NA	60	87
49	Persentase Desa yang memanfaatkan Dana Desa 10% untuk Bidang Kesehatan	%	5	10	43.85
50	Persentase Fasyankes primer / sekunder yang memberikan pelayanan sesuai standar	%	NA	100	100
51	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100
52	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100
53	Persentase Jaminan Kesehatan Nasional	%	79.98	100	86.91
54	Persentase Kec. dengan Pokjanal Desa Siaga	%	18.5	20.0	29.63
55	Persentase kecamatan yang melaksanakan STBM	%	100	100	100
56	Persentase Kecamatan yang memiliki kebijakan PHBS	%	50	60	100
57	Persentase Kecamatan yang mencapai PHBS Institusi Pendidikan sehat 10 %	%	100	100	100
58	Persentase Kecamatan yang mencapai Rumah Tangga sehat 76,5%	%	79.60	80.00	92.59
59	Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	%	80	80	75
60	Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1)	%	100	100	100
61	Persentase kunjungan neonatus lengkap dengan MTBM	%	100	100	100
62	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	39.6	100	133.02
63	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	64.24	100	269.6
64	Persentase orang terdeteksi dini infeksi Hepatitis B	%	0.90	1.00	1.9
65	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC	%	100	100	300
66	Persentase orang usia 15 59 th mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	11.58	100	75.45
No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Kinerja Tahun 2019	
				Target 2019	Capaian 2019

67	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	16.64	100	32.98
68	Persentase penduduk miskin non kuota terintegrasi JKN	%	95	95	114.9
69	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	17.69	100	148.05
70	Persentase Puskesmas dengan capaian SPM Kesehatan 100%	%	100	100	100
71	Persentase Puskesmas melaksanakan kesehatan kerja	%	21	46	61.54
72	Persentase Puskesmas melaksanakan Kesehatan Olah Raga pada kelompok masyarakat	%	35	43	61.54
73	Persentase puskesmas melaksanakan STBM	%	100	100	100
74	Persentase Puskesmas Terakreditasi	%	100	100	100
75	Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	%	65	65	100
76	Persentase puskesmas yang melaksanakan pengelolaan obat sesuai standar	%	85	85	100
77	Persentase rumah tangga mengakses sanitasi dasar yang layak	%	82.88	100	87.64
78	Persentase sarana kefarmasian yang memenuhi standar	%	65	65	100
79	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	52.31	100	85.75
80	Prevalensi anemia pada ibu hamil	%	NA	20	16.53
81	Prevalensi balita stunting	%	20.4	18.0	15.96
82	Prevalensi Gizi Buruk	%	0.07	0.07	0.07
83	Prevalensi gizi kurang	%	7.60	7.80	8.45
84	Prevalensi HIV / AIDS (%) dari total populasi	%	0.22	0.14	0.15
85	Prevalensi kurus (wasting) pada anak balita mencapai 9,5%	%	NA	7	4.67
86	Prevalensi obesitas pada penduduk usia lebih dari 18 tahun	%	12.29	12.20	8.42
87	Prevalensi tekanan darah tinggi	%	38.9	38.7	7.21
88	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat antimalaria yang tepat	%	100	100	0
89	Proporsi jumlah kasus Tuberculosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	70.10	72.52	150.39
90	Proporsi penduduk dengan asupan minimal < 2.100 Kkal/hari	%	NA	71	83.14
91	Prosentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan	%	79	82	83
92	Rasio dokter per satuan penduduk	%	0.15	0.19	0.43
93	Rasio posyandu per satuan balita		20.90	20.30	20.71
94	Rasio Puskesmas persatuan penduduk (per mil)		0.02	0.02	0,02
95	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (per mil)	Rasio	0.01	0.01	0,01
96	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	%	0.35	0.38	0.26
97	Tingkat kematian akibat malaria	%	0.00	0.00	0
98	Tingkat Kematian karena Tuberculosis (Per 100.000 penduduk)		3	3	1.46
99	Tingkat prevalensi Tuberculosis (per 100.000 penduduk)		168	245	341.8

Capaian indikator kinerja tahun 2019 rata-rata tercapai/baik, namun demikian masih ada beberapa indikator yang belum maksimal seperti :

1. Angka keberhasilan pengobatan pasien TB RO (71,73 = sedang)

2. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional 86,91%
3. Persentase bayi baru lahir lahir rendah 81,2%
4. Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan 93,75%
5. Persentase orang usia 15 -59 tahun mendapatkan skrinning kesehatan sesuai standar 75,45%
6. Persentase rumah tangga mengakses sanitasi dasar yang layak 87,64%
7. Persentase orang usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrinning kesehatan sesuai standar 85,75%
8. Rasio tenaga medis per satuan penduduk 68,42%, dan
9. Prevalensi Tuberculosis 60,49%

Sedangkan indikator kinerja yang masih **kurang** adalah :

1. Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 32,98%, dan
2. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 45,61%.

D. Realisasi Anggaran dalam Pencapaian Kinerja

Realisasi anggaran yang digunakan dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel 2.7.

1. Penganggaran dalam Pencapaian Sasaran Strategis

Alokasi anggaran dan realisasi anggaran yang dipergunakan dalam rangka pencapaian Indikator sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2019 secara terperinci dapat dilihat dalam tabel 2.7.

Tabel 2.7

Realisasi Anggaran dalam Pencapaian Sasaran Strategis
Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
Meningkatnya kualitas kesehatan ibu	Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)	37.854.000.000	31.319.563.470	82,74
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	219.779.609.867	188.741.790.772	85,88
Meningkatnya kualitas kesehatan balita	Persentase Balita Gizi Buruk (%)	6.097.999.000	4.341.216.519	71,19
Jumlah		263.731.608.867	224.402.570.761	85,09

Sumber: Data Terolah Realisasi Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2019

Berdasarkan tabel 2.7 diketahui bahwa untuk mewujudkan sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas terdapat tiga indikator kinerja yang harus dicapai melalui dukungan anggaran yang tersedia sesuai dengan program pendukung pelaksanaan sasaran strategis. Program pendukung

untuk masing-masing indikator kinerja sasaran strategis diuraikan sebagai berikut.

- a. Angka Kematian Ibu didukung oleh tiga program, yaitu:
 - Program Upaya Kesehatan Masyarakat
 - Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
 - Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- b. Angka Usia Harapan Hidup didukung oleh sembilan program, yaitu :
 - Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
 - Program Pelayanan Kesehatan
 - Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya
 - Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
 - Program Manajemen dan Kebijakan Kesehatan
 - Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata
 - Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran
 - Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah
- c. Prevalensi balita gizi buruk didukung oleh dua program, yaitu:
 - Perbaikan Gizi Masyarakat
 - Pengembangan Hygiene Sanitasi dan Kesehatan Masyarakat

Walaupun demikian, dalam rangka mewujudkan kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas tidak dapat dilihat secara parsial karena dalam pelaksanaan program saling terkait dan saling mendukung satu sama lain. Seluruh program memiliki peran serta dalam mewujudkan kinerja sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas secara optimal.

2. Analisis Efektifitas

Efektifitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel 2.8.

Tabel 2.8

Efektifitas Anggaran dalam Pencapaian Sasaran Strategis
Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2019

Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	
			Rp	%
Meningkatnya kualitas kesehatan ibu	1 indikator	144,51	31.319.563.470	82,74
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	1 indikator	99,89	188.741.790.772	85,88
Meningkatnya kualitas kesehatan balita	1 indikator	100	4.341.216.519	71,19
Rata-rata capaian kinerja/ Jumlah		114, 80	224.402.570.761	85,09

Sumber: Data Terolah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2019

Berdasarkan tabel 2.8 diketahui bahwa dalam upaya pencapaian sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas tahun 2019 diwujudkan melalui tiga indikator kinerja. Masing-masing sasaran strategis memiliki satu indikator. Efektivitas tertinggi ada pada indikator kinerja dari sasaran strategis meningkatnya kualitas kesehatan ibu dengan capaian kinerja 144,51% dengan realisasi anggaran sebesar 82,74% dari anggaran yang direncanakan. Efektivitas terendah terdapat pada indikator kinerja dari sasaran strategis meningkatnya kualitas kesehatan hidup masyarakat, untuk mencapai capaian kinerja 99,89% anggaran yang terealisasi sebesar 85,88% dari alokasi anggaran program pendukung yang tersedia.

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas tahun 2019 diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 114,80% dengan realisasi anggaran sebesar 85,09% dari alokasi anggaran yang tersedia. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas di tahun 2019 masuk dalam kategori sangat efektif. Kategori sangat efektif diartikan bahwa seluruh program dan kegiatan pendukung sasaran strategis yang telah dilaksanakan adalah tepat sasaran dan berhasil guna.

E. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dalam mewujudkan sasaran strategis melalui keberhasilan pencapaian indikator kinerja secara optimal dapat dilihat dalam tabel 2.9.

Tabel 2.9

Tingkat Efisiensi Capaian Sasaran Strategis
Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2019

Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Meningkatnya kualitas kesehatan ibu	1 indikator	144,51	82,74	61,77
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	1 indikator	99,89	85,88	-
Meningkatnya kualitas kesehatan balita	1 indikator	100	71,19	28,81
Jumlah/Rata-rata capaian		114,80	85,09	29,71

Sumber: Data Terolah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2019

Berdasarkan tabel 2.9 dapat diketahui bahwa dari jumlah indikator sasaran strategis yang ada terdapat dua indikator dengan capaian kinerja sama dengan atau lebih dari 100%. Efisiensi dari rata-rata capaian kinerja sasaran dengan capaian anggaran sebesar 29,71%.

Tingkat efisiensi tertinggi terdapat pada indikator kinerja dari sasaran strategis meningkatnya kualitas kesehatan ibu sebesar 61,77%. Tingginya tingkat efisiensi tersebut berbanding lurus dengan tingginya capaian kinerja. Untuk mencapai kinerja sebesar 144,51% membutuhkan anggaran sebesar 82,74% dari alokasi anggaran yang tersedia. Berdasarkan rekapitulasi realisasi anggaran tiap program Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas tahun 2019, dari tiga program pendukung sasaran strategis meningkatnya kualitas kesehatan ibu terdapat satu program dengan realisasi anggaran kurang dari 80% berupa kegiatan Dukungan Manajemen BOK Kabupaten dan Jampersal bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK).

Efisiensi selanjutnya terdapat pada indikator kinerja dari sasaran strategis meningkatnya kualitas kesehatan balita dengan nilai efisiensi 28,81%. Diartikan bahwa untuk mencapai kinerja 100% memerlukan dukungan anggaran sebesar 71,19% dari alokasi anggaran yang tersedia. Berdasarkan rekapitulasi realisasi anggaran tiap program Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas tahun 2019, dari dua program pendukung sasaran strategis meningkatnya kualitas kesehatan balita terdapat salah satu program dengan realisasi anggaran sebesar 70,19% berupa kegiatan BOK Stunting bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK).

Tabel 2.10

Realisasi Anggaran Prgram Kegiatan Tahun 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU 2019	REALISASI	%
-----------	-------------------------	------------------	------------------	----------

	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	2.467.545.000	2.031.967.688	82,35
1	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah	336.000.000	245.868.659	
2	Penyediaan bahan logistik Perangkat Daerah	281.475.000	233.872.455	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	280.000.000	196.825.000	
4	Penyediaan tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah	561.920.000	504.155.000	
5	Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas Perangkat Daerah	443.150.000	340.812.212	
6	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	150.000.000	121.100.000	
7	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	120.000.000	108.675.000	
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perangkat Daerah	115.000.000	107.817.750	
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala dinas/Operasional kendaraan Perangkat Daerah	180.000.000	172.841.612	
	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	175.000.000	128.169.000	73,24
10	Penyusunan Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	175.000.000	128.169.000	
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	8.787.000.000	6.685.632.261	76,09
11	Jaminan Persalinan (DAK)	6.342.000.000	5.127.749.073	
12	Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	770.000.000	686.479.938	
13	Dukungan Manajemen BOK Kabupaten dan Jampersal (DAK)	1.675.000.000	871.403.250	
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	28.567.000.000	23.494.429.985	82,24
14	Bantuan operasional kesehatan BKMIA (DAK)	200.000.000	140.453.000	
15	Bantuan operasional kesehatan BKMM (DAK)	200.000.000	63.610.400	
16	Bantuan operasional kesehatan BKPM (DAK)	200.000.000	82.750.000	
17	Bantuan operasional kesehatan Puskesmas Lumbir (DAK)	720.000.000	582.031.000	
18	Bantuan operasional kesehatan Puskesmas I Wangon (DAK)	670.000.000	537.872.400	
19	Bantuan operasional kesehatan Puskesmas II Wangon (DAK)	630.000.000	493.989.470	
20	Bantuan operasional kesehatan Puskesmas Jatilawang (DAK)	740.000.000	577.126.640	
21	Bantuan operasional kesehatan Puskesmas Rawalo (DAK)	710.000.000	622.968.800	
22	Bantuan operasional kesehatan Puskesmas Kebasen (DAK)	740.000.000	623.619.120	
NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU 2019	REALISASI	%
23	Bantuan operasional kesehatan Puskesmas I Kemranjen (DAK)	660.000.000	612.305.940	

24	Bantuan operasional kesehatan Puskesmas II Kemranjen (DAK)	654.000.000	523.122.250	
25	Bantuan operasional kesehatan Puskesmas I Sumpiuh (DAK)	670.000.000	598.331.000	
26	Bantuan operasional kesehatan Puskesmas II Sumpiuh (DAK)	670.000.000	568.311.300	
27	Bantuan operasional kesehatan Puskesmas I Tambak (DAK)	660.000.000	619.145.700	
28	Bantuan operasional kesehatan Puskesmas II Tambak (DAK)	650.000.000	584.996.500	
29	Bantuan operasional kesehatan Puskesmas Somagede (DAK)	650.000.000	502.456.940	
30	Bantuan operasional kesehatan Puskesmas Kalibagor (DAK)	650.000.000	364.242.000	
31	Bantuan operasional kesehatan Puskesmas Banyumas (DAK)	740.000.000	663.945.360	
32	Bantuan operasional kesehatan Puskesmas Patikraja (DAK)	740.000.000	580.601.200	
33	Bantuan operasional kesehatan Puskesmas Purwojati (DAK)	730.000.000	659.663.300	
34	Bantuan operasional kesehatan Puskesmas I Ajibarang (DAK)	680.000.000	542.757.500	
35	Bantuan operasional kesehatan Puskesmas II Ajibarang (DAK)	675.000.000	630.718.300	
36	Bantuan operasional kesehatan Puskesmas Gumelar (DAK)	720.000.000	521.242.500	
37	Bantuan operasional kesehatan Puskesmas Pekuncen (DAK)	685.000.000	641.794.800	
38	Bantuan operasional kesehatan Puskesmas I Cilongok (DAK)	745.000.000	634.936.700	
39	Bantuan operasional kesehatan Puskesmas II Cilongok (DAK)	685.000.000	611.527.300	
40	Bantuan operasional kesehatan Puskesmas Karanglewas (DAK)	750.000.000	650.818.094	
41	Bantuan operasional kesehatan Puskesmas Purwokerto Barat (DAK)	730.000.000	513.222.900	
42	Bantuan operasional kesehatan Puskesmas I Purwokerto Timur (DAK)	650.000.000	626.642.080	
43	Bantuan operasional kesehatan Puskesmas II Purwokerto Timur (DAK)	650.000.000	548.142.000	
44	Bantuan operasional kesehatan Puskesmas Purwokerto Selatan (DAK)	665.000.000	562.781.392	
45	Bantuan operasional kesehatan Puskesmas I Purwokerto Utara (DAK)	650.000.000	643.540.450	
46	Bantuan operasional kesehatan Puskesmas II Purwokerto Utara (DAK)	650.000.000	581.716.500	
47	Bantuan operasional kesehatan Puskesmas I Sokaraja (DAK)	750.000.000	613.210.300	
NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU 2019	REALISASI	%
48	Bantuan operasional kesehatan Puskesmas II Sokaraja (DAK)	685.000.000	562.622.500	

49	Bantuan operasional kesehatan Puskesmas I Kembaran (DAK)	685.000.000	526.205.300	
50	Bantuan operasional kesehatan Puskesmas II Kembaran (DAK)	685.000.000	519.946.360	
51	Bantuan operasional kesehatan Puskesmas I Sumbang (DAK)	745.000.000	645.546.410	
52	Bantuan operasional kesehatan Puskesmas II Sumbang (DAK)	670.000.000	577.359.140	
53	Bantuan operasional kesehatan Puskesmas I Baturaden (DAK)	655.000.000	490.876.100	
54	Bantuan operasional kesehatan Puskesmas II Baturaden (DAK)	655.000.000	581.274.250	
55	Bantuan operasional kesehatan Puskesmas Kedungbanteng (DAK)	750.000.000	635.065.600	
56	Bantuan operasional kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan	1.068.000.000	630.941.189	
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	7.009.655.000	5.642.729.953	80,50
57	Bantuan operasional kesehatan Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK Distribusi Obat dan E-Logistik)	203.974.000	140.272.524	
58	Peningkatan Sarana Prasarana kefarmasian, obat dan perbekalan kesehatan serta operasional DAK kefarmasian (DAK Farmasi)	6.345.681.000	5.110.652.774	
59	Operasional Unit Perbekalan Kesehatan dan Kefarmasian (UPKF)	260.000.000	211.551.925	
60	Pembinaan pengawasan Obat, makanan, dan minuman dan bahan berbahaya	200.000.000	180.252.730	
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	500.000.000	465.772.530	93,15
61	Pengembangan media promosi kesehatan	300.000.000	291.005.943	
62	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan bidang kesehatan	200.000.000	174.766.587	
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	5.847.999.000	4.075.564.219	69,69
63	Peningkatan Status Gizi Masyarakat	255.000.000	217.196.500	
64	Stunting (DAK)	4.842.999.000	3.457.650.570	
65	BOK Stunting (DAK)	750.000.000	400.717.149	
	Program Pengembangan Hygiene Sanitasi dan Kesehatan Masyarakat	250.000.000	185.558.300	
66	Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olah raga	250.000.000	185.558.300	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	8.092.198.000	4.538.792.396	74,22
NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU 2019	REALISASI	%
67	Pengendalian penyakit bersumber binatang (P2B2)	320.000.000	158.003.132	

68	Pengendalian penyakit menular langsung (P2ML)	300.000.000	279.289.660	
69	Peningkatan imunisasi	100.000.000	93.943.400	
70	Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah	200.000.000	180.702.400	
71	Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	300.000.000	291.669.700	
72	Pengendalian penyakit (DAK)	6.872.198.000	3.535.184.104	
	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	350.000.000	132.978.500	56,09
73	Peningkatan Ketrampilan Tenaga Kesehatan	150.000.000	94.892.900	
74	Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan	100.000.000	28.424.100	
75	Penyelenggaraan pembinaan dan Pengawasan Sarana Pelayanan Kesehatan	100.000.000	9.661.500	
	Program Pelayanan Kesehatan	36.674.750.500	33.497.819.960	91,34
76	Pengembangan jamkesda	200.000.000	137.611.119	
77	Pembiayaan pelayanan kesehatan jaminan kesehatan masyarakat daerah (Jamkesda)	27.200.000.000	26.691.069.834	
78	Pelayanan Kesehatan Rujukan	571.708.500	443.732.163	
79	Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional	400.000.000	269.562.200	
80	Akreditasi Puskesmas	3.726.725.000	2.020.759.850	
81	Peningkatan Mutu FKTP dan Akreditasi Labkesmas	250.000.000	95.208.387	
82	Penambahan Operasional Puskesmas 1 Purwokerto Timur	200.000.000	199.655.449	
83	Penambahan Operasional Puskesmas 2 Purwokerto Timur	434.400.000	359.661.423	
84	Penambahan Operasional Puskesmas I Purwokerto Utara	335.380.000	249.398.961	
85	Penambahan Operasional Puskesmas 2 Purwokerto Utara	400.000.000	335.206.584	
86	Penambahan Operasional Puskesmas 2 Wangon	290.600.000	270.450.000	
87	Penambahan Operasional Puskesmas 2 Tambak	250.000.000	247.868.000	
88	Penambahan Operasional Puskesmas 2 Baturraden	278.517.000	262.723.795	
89	Penambahan Operasional Puskesmas 2 Sokaraja	256.750.000	241.660.000	
90	Penambahan Operasional Labkesmas	323.098.000	309.419.088	
91	Penambahan Operasional Puskesmas Purwojati	186.173.000	179.304.419	
92	Penambahan Operasional Puskesmas Purwokerto Barat	256.400.000	255.264.240	
93	Penambahan Operasional Puskesmas 2 Kembaran	271.688.000	242.444.345	
94	Penambahan Operasional BKMIA	450.000.000	419.132.985	
95	Penambahan Operasional Puskesmas 2 Kemranjen	393.311.000	267.687.118	
	BLUD	139.507.032.867	117.491.006.242	84,22
74	Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas Lumbir	4.447.052.698	3.886.797.617	
NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU 2019	REALISASI	%
75	Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas I Wangon	4.655.164.110	4.621.536.211	

76	Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas II Wangon	1.478.990.875	1.306.928.003	
77	Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas Jatilawang	5.136.681.374	4.377.867.015	
78	Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas Rawalo	4.375.903.414	3.655.600.600	
79	Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas Kebasen	6.970.229.337	3.959.088.952	
80	Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas I Kemranjen	3.103.791.404	3.098.681.575	
81	Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas II Kemranjen	2.647.356.150	2.325.560.337	
82	Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas I Sumpiuh	3.337.610.000	3.307.321.845	
83	Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas II Sumpiuh	1.819.679.776	1.836.926.981	
84	Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas I Tambak	2.760.729.141	2.295.210.615	
85	Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas II Tambak	1.575.065.572	1.471.226.470	
86	Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas Somagede	2.641.760.569	2.370.634.317	
87	Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas Kalibagor	3.114.040.138	2.960.477.338	
88	Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas Banyumas	3.768.266.819	3.157.505.335	
89	Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas Patikraja	4.220.859.260	3.186.253.812	
90	Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas Purwojati	2.438.963.082	2.437.842.306	
91	Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas I Ajibarang	3.492.155.026	3.389.949.955	
92	Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas II Ajibarang	3.348.525.117	3.143.460.692	
93	Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas Gumelar	3.885.451.741	3.666.983.186	
94	Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas Pekuncen	6.026.519.299	4.834.931.282	
95	Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas I Cilongok	7.521.178.563	4.732.151.512	
96	Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas II Cilongok	4.710.263.911	3.104.881.832	
97	Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas Karanglewas	4.431.015.624	3.473.065.443	
98	Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas Purwokerto Barat	1.797.078.081	1.689.902.213	
99	Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas I Purwokerto Timur	1.198.936.770	1.147.587.309	
100	Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas II Purwokerto Timur	909.274.095	889.951.691	
NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU 2019	REALISASI	%

101	Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas Purwokerto Selatan	2.790.350.733	2.524.367.884	
102	Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas I Purwokerto Utara	832.811.017	797.954.613	
103	Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas II Purwokerto Utara	1.013.055.784	994.923.002	
104	Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas I Sokaraja	3.146.343.424	2.592.124.965	
105	Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas II Sokaraja	1.477.046.762	1.470.878.834	
106	Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas I Kembaran	2.044.180.744	1.965.903.798	
107	Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas II Kembaran	1.724.766.968	1.581.348.689	
108	Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas I Sumbang	3.460.704.124	3.010.834.609	
109	Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas II Sumbang	3.888.037.720	2.977.110.540	
110	Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas I Baturaden	1.783.293.491	1.756.947.449	
111	Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas II Baturaden	1.434.635.855	1.273.551.950	
112	Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas Kedungbanteng	4.008.505.557	3.239.130.162	
113	Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan BKPM	4.526.453.625	4.410.832.449	
114	Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan BKMM	8.286.525.178	6.503.881.607	
115	Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan Labkesmas	1.243.973.528	1.237.090.171	
116	Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan BKMI	2.033.806.411	825.801.076	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	18.295.428.500	17.232.892.199	94,19
96	Pengadaan puskesmas keliling	825.000.000	702.900.000	
97	Peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya serta operasional (DAK kesehatan dasar)	7.199.999.000	6.921.260.599	
98	Pembangunan/rehabilitasi Puskesmas, Pustu dan Rumah Dinas	9.612.000.000	9.420.822.600	
99	Penyusunan / review DED Pembangunan / Rehabilitasi Puskesmas / Pustu	250.000.000	187.909.000	
100	Pengadaan sarana dan prasarana Balai Kesehatan, klinik dan Laboratorium Kesehatan	408.429.500	-	
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	7.008.000.000	6.993.118.900	99,79

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU 2019	REALISASI	%
101	Peningkatan sarana prasarana Balai Kesehatan Paru Masyarakat (DBHCHT)	-	-	
102	Pembangunan Rumah Sakit Khusus Mata/Indra	7.008.000.000	6.993.118.900	
	Program Manajemen dan Kebijakan Kesehatan	200.000.000	120.882.999	60,44
103	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	200.000.000	120.882.999	
	JUMLAH	124.224.576.000	105.226.308.890	84,71
	DINAS	124.224.576.000	105.226.308.890	84,71
	BLUD	139.507.032.867	117.491.006.242	
	TOTAL	263.731.608.867	222.717.315.132	84,45

Disamping permasalahan capaian IKU dan IKK yang belum mencapai target, permasalahan lain yaitu kondisi yang perlu sarana/prasarana, alat kesehatan, operasional yang belum mencukupi/memadai.

1. Sarana prasarana yang belum memadai :
 - a. Gedung/bangunan Puskesmas : Baturaden II, Sokaraja I, Kembaran I, Purwokerto Timur I, Kedungbanteng, Pekuncen I, Tambak II, Kemranjen II
 - b. Gedung/bangunan Puskesmas Pembantu : Dermaji – Lumbir, Kedungurang – Gumelar, Kaliwedi – Kebasen, Ketanda – Sumpiuh, Grujugan – Kemranjen, Tenjogiri Kemutug Lor – Baturaden, Patikraja – Patikraja.
 - c. IPAL : Puskesmas Lumbir, Cilongok II, Baturaden I, Kembaran I, Sokaraja I, Wangon II, Rawalo, Kemranjen II, Tambak I, Baturaden II.
 - d. Alat Kesehatan kurang/belum memadai di Puskesmas : Pekuncen II, Sumpiuh II, Baturaden II, Purwokerto Timur I, Purwokerto Timur II, Purwokerto Utara I, Purwokerto Utara II, Tambak II, Kemranjen II, Kembaran I, Kembaran II, BKMIA, BKPM dan Labkesmas.
 - e. Saran prasarana pengembangan BKMM menjadi Rumah Sakit Khusus Mata.
 - f. Ambulance/Pusling/Mobil operasional teknis : Puskesmas Purwokerto Timur I, Wangon II, Pekuncen II, UPKF dan mobil fogging bidang Pencegahan Penyakit.
2. Operasional pelayanan masih kurang di Puskesmas kapitasi kecil : Sumpiuh II, Baturaden II, Purwokerto Timur I, Purwokerto Timur II, Purwokerto Utara I, Purwokerto Utara II, Tambak II, Kemranjen II, Kembaran I, Kembaran II, Wangon II, Baturaden I, Purwojati, Tambak II dan BKMIA, serta Labkesmas.
3. Krisis kesehatan karena pandemi Covid -19 yang melanda dunia, termasuk Indoneasia maka kebutuhan dana untuk penanganan dan penanggulangan serta pencegahan penyakit Covid19 sangat tinggi baik pada saat terjadi pandemi maupun pasca pandemi.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dirumuskan berdasarkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas yang telah disampaikan pada saat kampanye Pilkada tahun 2018, yaitu

“Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”

Dalam rangka mengarahkan pencapaian visi Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023, maka berdasarkan misi yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 diuraikan sebagai berikut.

Untuk menjabarkan visi dan misi pembangunan Jangka Menengah Bupati Banyumas tahun 2018-2023, maka Tujuan Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023 adalah **Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,**

B. Sasaran

Sasaran Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya adalah Meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang ditandai dengan indikator :

- 1) Angka Harapan Hidup (AHH)
- 2) Angka Kematian Ibu melahirkan, dan
- 3) Prevalensi Balita Gizi buruk

C. Rencana Program dan kegiatan tahun 2021

Penyusunan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 merupakan transisi perubahan dari pedoman Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ke Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan mengintegrasikan dan menyelaraskan indikator kinerja Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2018 – 2023.

Rancangan Renja Tahun 2021 terdiri dari 4 Program wajib, 1 program penunjang, 14 kegiatan dan 69 Sub Kegiatan, yang terinci dalam tabel 3.1.

Tabel. 3.1.
Rencana Kerja Program dan Kegiatan Tahun 2021

No.		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kegiatan/ Indikator SubKegiatan	Total
A.		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Persentase realisasi keuangan program Penunjang Urusan Pemerintahan2. Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan3. Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	101.822.253.000
	I	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	125.000.000
		1 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen renstra yang disusun2. Jumlah dokumen renja yang disusun	125.000.000
	II	Administrasi Keuangan	Tersedianya pelayanan Administrasi Keuangan	98.000.000.000
		2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	98.000.000.000
	III	Administrasi Umum	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	3.697.253.000
		3 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Pembayaran Pajak, PBB dan Pajak kendaraan yang dibayar2. Jasa langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dibayar	1.655.907.000
		4 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Biaya Sewa Peralatan dan perlengkapan kantor yang dibayar	20.000.000
		5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1. tenaga kontrak/tenaga non PNS yang dibayar premi asuransi2. Jasa publikasi yang dibayar3. Jasa transaksi keuangan yang dibayar4. Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan5. Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honorarnya6. Jasa instruktur kegiatan yang dibayar	1.077.346.000
		6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		15.000.000
		7 Penyediaan Alat Tulis Kantor	1. Alat Tulis Kantor yang tersedia2. peranko, materai dan benda pos lainnya yang tersedia	70.000.000
		8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	cetak dan penggandaan yang tersedia	60.000.000
		9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik dan elektronik yang tersedia	15.000.000
		10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	20.000.000
		11 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor yang tersedia	189.000.000
		12 Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan Minum harian Pegawai, Rapat dan jamuan tamu yang tersedia	85.000.000
No.		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kegiatan/ Indikator SubKegiatan	Total

			Kegiatan/ Subkegiatan		
		13	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1. Perjalanan dinas untuk rapat, Koordinasi dan konsultasi 2. Kegiatan Monitoring evaluasi Kepegawaian dan Keuangan, 3.. Kegiatan Koordinasi, Konsultasi dan pertemuan Tk.Provinsi/ Pusat yang dilaksanakan	250.000.000
		14	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peralatan kantor perangkat daerah yang tersedia	20.000.000
		15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	gedung pemerintah dalam kondisi baik	120.000.000
		16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1. kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik2. kendaraan bermotor Roda 4 dalam keadaan baik	100.000.000
B			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		67.543.690.000
	I		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		27.018.690.000
		1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Pembangunan Rumah Sakit Khusus Paru	-
		2	Pembangunan Puskesmas	1. Jumlah Puskesmas direhab/dibangun2. Monitoring Sarpras3. Pembangunan Puskesmas4. Rapat Koordinasi Sarpras	10.000.000.000
		3	Pengembangan Puskesmas	Pembangunan Puskesmas PONED	2.000.000.000
		4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Pembangunan Pustu	5.250.000.000
		5	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1. Jumlah Ambulan Pusling Puskesmas2. Pengadaan Genset3. Jumlah Ambulan4. Jumlah Ambulan Transport5. Jumlah Alat kesehatan6. Jumlah Genset7. Pembangunan IPAL	1.450.000.000
		6	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan tanah	2.000.000.000
		7	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1. Jumlah Alkes Puskesmas2. 3. Konsultansi dan Koordinasi 4. Jumlah alat antropometri Kit5. Pengadaan Alkes 6. Tersedianya alkes di Puskesmas PONED	400.000.000
		8	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Terkalibrasinya alat kesehatan untuk menjaga kualitas alat kesehatan	100.000.000
		9	Pengadaan Obat, Vaksin	1. Jumlah form pengambilan vaksin dan grafik suhu2. Jumlah obat, bmhp, reagen3. Frekuensi pengambilan vaksin imunisasi dan logistik	5.000.000.000

No.		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kegiatan/ Indikator SubKegiatan	Total
		10	Pengadaan Bahan Habis Pakai	jumlah obat, bmhp, sarana administrasi, sarana penyimpanan 718.690.000
		11	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah IPAL Puskesmas 100.000.000
	II		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38.725.000.000
		12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1. Jumlah Bidan kelurahan 2. Penyuluhan Kesehatan Ibu hamil 3. Jumlah Bimtek Kesehatan Keluarga 4. Jumlah monitoring dan evaluasi kegiatan KIA 5. Pemeriksaan kesehatan ibu hamil 6. Jumlah Koordinasi dan konsultasi kegiatan KIA 7. Jumlah workshop penguatan kegiatan KIA 650.000.000
		13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) 2. Jumlah workshop penguatan kegiatan KIA 3. Persentase Puskesmas Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) 4. Pemeriksaan kesehatan ibu melahirkan 5. Jumlah Audit Maternal Perinatal 6. Penyuluhan Kesehatan Ibu dan Anak 4.100.000.000
		14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1. Pemeriksaan kesehatan bayi 2. Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1) 100.000.000
		15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1. Penyuluhan Kesehatan Balita 2. Persentase kunjungan neonatus lengkap dengan MTBM 3. Pemeriksaan kesehatan balita 100.000.000
		16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pemeriksaan kesehatan anak usia sekolah 100.000.000
		17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja 2. Jumlah Kampanye peduli PTM 3. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu 4. Jumlah Bimtek tentang P2PTM 5. Jumlah koordinasi PTM 6. Persentase Kecamatan yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah 100.000.000
		18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pemeriksaan kesehatan lansia 100.000.000
		19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Skrining/Pelayanan Kesehatan Hipertensi 200.000.000
		20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Skrining/Pelayanan Kesehatan Diabetes Melitus 100.000.000

No.		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kegiatan/ Indikator SubKegiatan	Total
	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Skrining/Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100.000.000
	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Skrining/Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100.000.000
	23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Skrining/Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	100.000.000
	24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		1.150.000.000
	25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1. Jumlah Sosialisasi, workshop kegiatan keslingkesjaor2. Jumlah Monitoring dan evaluasi kegiatan Keslingkesjaor.	300.000.000
	26	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		150.000.000
	27	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		200.000.000
	28	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		100.000.000
	29	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		650.000.000
	30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		50.000.000
	31	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		100.000.000
	32	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		2.700.000.000
	33	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		25.100.000.000
	34	Deteksi Dini Penyalahgunaan Napza Di Fasyankes dan Sekolah		50.000.000
	35	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah sampel kasus AFP, Campak dan KLB	50.000.000
	36	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		25.000.000
	37	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Sarana Prasarana Rumah Sakit Mata	1.200.000.000
	38	Operasional Pelayanan Puskesmas	UNKER pada 40 Puskesmas	-
	39	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	UNKER pada BKMM, BKPM, BKMIA, Labkesmas dan UPKF	-
	40	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		1.000.000.000

No.		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kegiatan/ Indikator SubKegiatan	Total	
		41	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1. Jumlah pelayanan perawatan kasus KIPI2. Jumlah Audit KIPI	50.000.000
	IV		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		400.000.000
		42	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah koordinasi dan konsultasi	100.000.000
		43	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1. Jumlah Cetak dan Penggandaan Kegiatan SIK2. Jumlah Monitoring dan evaluasi kegiatan SIK3. jasa Pengembangan Aplikasi SIK	200.000.000
		44	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jasa internet server SIMPUS	100.000.000
	V		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota		1.400.000.000
		45	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D	1. Jumlah Koordinasi dan konsultasi kegiatan pelayanan rujukan2. Jumlah Bimbingan teknis pelayanan rujukan3. Jumlah Monitoring dan Evaluasi kegiatan pelayanan rujukan	600.000.000
		46	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Workshop dalam rangka akreditasi Fasyankes.	300.000.000
		47	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1. Jumlah Tenaga PSC2. Jumlah pengadaan BMHP pelayanan Gawat Darurat PSC3. Internet dan telepon PSC 1194. Jumlah Pelayanan Rujukan Gadar PSC	500.000.000
C			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		900.000.000
	VI		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota		200.000.000
		48	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah visitasi perizinan perorangan.	200.000.000
	VII		Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota		405.000.000
		49	Pembinaan dan Pengawasan Sumberdaya Manusia Kesehatan	koordinasi dan konsultasi kegiatan peningkatan kualitas SDM Kesehatan	50.000.000

No.		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kegiatan/ Indikator SubKegiatan	Total	
		50	Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan	uji kompetensi Tegana Kesehatan PNS kegiatan peningkatan kualitas SDM Kesehatan	30.000.000
		51	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		325.000.000
	VIII		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia Di Wilayah Kabupaten/Kota		105.000.000
		52	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan		75.000.000
		53	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		30.000.000
	IX		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		150.000.000
		54	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		150.000.000
	X		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		40.000.000
		55	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		10.000.000
		56	Pengelolaan Sistem Informasi Sumberdaya Manusia Kesehatan		30.000.000
D			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman		305.000.000
	XI		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		85.000.000

No.		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kegiatan/ Indikator SubKegiatan	Total
	57	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		30.000.000
	58	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		35.000.000
	59	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengkajian perijinan bagi Sarana Pelayanan Kefarmasian sesuai standar dan persyaratan	20.000.000
XII		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga		20.000.000
	60	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan PKRT kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga		10.000.000
	61	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga		10.000.000
XIII		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		15.000.000

No.		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kegiatan/ Indikator SubKegiatan	Total
	62	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	1. Pengawasan IRTP dalam rangka Penerbitan Sertifikat Produksi PIRT2. Jumlah peserta Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dalam rangka Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)3. Jumlah Bimbingan Teknis/Pertemuan Teknis/Pembinaan Teknis dalam rangka pengawasan obat dan makanan4. Pengawasan Postmarket IRTP(monev dan KIE)5. Pengawasan Postmarket Produk Makanan Minuman IRT	15.000.000
XIV		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		25.000.000
	63	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan Penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)		25.000.000
XV		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		15.000.000
	64	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	Jumlah Pemeriksaan Kualitas Makanan Minuman (Jajanan anak sekolah/hasil pengawasan pasar/toko	15.000.000
XVI		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		145.000.000
	65	Pemeriksaan post market pada produk makanan-minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan.	Jumlah Pemeriksaan Kualitas Makanan Minuman (Jajanan anak sekolah/hasil pengawasan pasar/toko	45.000.000

No.		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kegiatan/ Indikator SubKegiatan	Total
		66	Penyediaan dan pengelolaan Data tindak lanjut pengawasan perizinan industri rumah tangga	100.000.000
E			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	520.000.000
	XVII		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	300.000.000
		67	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Lomba PHBS RT, PHBS Institusi, Posyandu Lansia 300.000.000
	XVIII		Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	200.000.000
		68	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1. Kampanye Kesehatan 2. Bimbingan teknis/Workshop petugas puskesmas dalam pengembangan desa siaga 200.000.000
	XIX		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000
		69	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	20.000.000
			Operasional UNKER : BLUD PUSKESMAS	12 bulan di 40 Puskesmas 113.792.421.000
			Operasional UNKER BKMM	12 bulan 4.560.103.000
			Operasional UNKER BLUD BKPM	12 bulan 2.826.533.000
			Operasional UNKER BLUD BKMIA	12 bulan 791.795.000
			Operasional UNKER BLUD LABKESMAS	12 bulan 1.496.895.000
			Operasional UNKER BLUD UPKF	12 bulan 500.000.000
			TOTAL	295.058.690.000

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020, dimana RKPD Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023 yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Banyumas Tahun 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025.

Renja ini disusun dengan melakukan penajaman program, kegiatan dan pagu indikatif yang akan dijadikan pedoman bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam melaksanakan program/kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2021. Disamping itu Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas juga berfungsi untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Program Kegiatan strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2021 tidak terlepas dari komitmen, peran dan tanggungjawab seluruh komponen Dinas Kesehatan serta peran aktif stakeholder yang terkait.

Purwokerto, Juni 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN
KAB. BANYUMAS



SADIYANTO, SKM, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19621011 198402 1001